

**PERAN BALAI PENYULUHAN KELUARGA BERENCANA (KB) SUNGAI
AMBAWANG DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING (STUDI KASUS DI KECAMATAN
SUNGAI AMBawang, KUBU RAYA)**

¹Haris Mirza Saputra, ²Ismail Umar, ³Endang Wahyuni

¹Politeknik Negeri Pontianak

²Politeknik Negeri Pontianak

³Politeknik Negeri Pontianak

e-mail korespondensi: harismirza660@gmail.com

Abstrak

Sebagai salah satu kabupaten di Kalimantan barat, Kabupaten Kubu Raya merupakan wilayah yang memiliki permasalahan stunting. Kondisi ini dapat dilihat dari hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, angka stunting di Kalimantan Barat (Kalbar) adalah 24,5%. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Kubu Raya tahun 2023, jumlah balita stunting (kerdil) sebesar 25,4% atau berjumlah 17.895 balita. Sedangkan pada Kecamatan Ambawang sebanyak 2.586 balita mengalami stunting ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dengan Jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Lokasi pengumpulan data yaitu Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Peran Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) Sungai Ambawang dalam Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Studi Kasus di Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya . Dengan penekanan pada aspek-aspek peran yang dimiliki organisasi sebagai: fasilitator, katalisator, regulator dan dinamisator. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini secara teoritis memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu sosial, khususnya dalam pengkajian implementasi kebijakan publik. Selain itu manfaat yang diharapkan secara praktis yaitu memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya.

Kata Kunci: Kubu Raya, Peran, Stunting

PENDAHULUAN

Stunting merupakan permasalahan serius yang dialami oleh pemerintah yang dapat mempengaruhi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Menurut WHO, Stunting (kerdil) adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak. Stunting merupakan Kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (BKKBN, 2021).

Anak stunting mempunyai Intelligence Quotient (IQ) lebih rendah dibandingkan rata – rata IQ anak normal (Kemenkes RI, 2018). Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 prevalensi stunting di Indonesia adalah sebesar 24,4, pada tahun 2022 sebesar 21,6%, pada tahun 2023 sebesar 21,5%.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Kubu Raya tahun 2023, persebaran balita yang mengalami stunting sebanyak 17.895 balita tersebut tersebar di Kecamatan Terentang sebanyak (687) anak, lalu di Kecamatan Sungai Raya (8.677), Kecamatan Sungai Kakap (5.290), Kecamatan Sungai Ambawang (2.586), dan di Kecamatan Teluk Pakedai sebanyak (775) anak balita. Kondisi ini dan besarnya jumlah stunting di Kabupaten Kubu Raya ini tentunya perlu di atasi dengan berbagai bentuk program pemerintah yang tepat untuk dilakukan. Dari uraian diatas, peneliti melakukan penelitian dengan judul penelitian, ” Peran Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) Sungai Ambawang Dalam Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya)”.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Dengan menggunakan alat pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) Sungai Ambawang sebagai Fasilitator dalam Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Studi Kasus di Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya

Penurunan stunting merupakan upaya yang dilakukan oleh Balai Penyuluhan Keluarga Bencana (BPKB) Kec. Sungai Ambawang mengingat stunting dapat berdampak serius bagi sumber daya manusia (SDM) kedepannya, khususnya di Kab. Kubu Raya mengingat stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga pada perkembangan otak, kesehatan jangka panjang, dan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Sehingga keseriusan dalam mengatasi ini merupakan kewajiban bagi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Sebagai fasilitator, Balai Penyuluhan KB Sungai Ambawang berperan untuk menghubungkan, menggerakkan, dan mendukung kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam upaya penurunan stunting. Dalam pelaksanaannya Balai Penyuluhan Keluarga Bencana (BPKB) melakukan kolaborasi dengan beberapa pihak diantaranya : Puskesmas, Posyandu, Penghulu Pernikahan, Perangkat Pemerintah Desa, Sekolah-Sekolah baik SMP serta SMA serta yang terutama adalah masyarakat yang ada dikecamatan sungai ambawang. Di kecamatan sungai ambawang terdapat 15 (lima belas) desa yang menjadi sasaran pelaksanaan program percepatan penurunan stunting, agar efektif dalam pelaksanaannya diatur pembagian kerja antara pegawai BPKB dengan jumlah desa yang ada. Sehingga Menurut Koordinator BPKB, masing-masing ASN membina 3 (tiga) desa, sedangkan yang honorer/non PNS melakukan pembinaan 1 (satu) desa.

Salah satu bentuk kolaborasi kegiatan yang dilakukan Balai Penyuluhan Keluarga Bencana (BPKB) adalah pelaksanaan penyuluhan dengan menyesuaikan dengan jadwal Posyandu untuk sekaligus melakukan pembinaan kepada masyarakat mengenai pola asuh anak yang tidak jarang menjadi penyebab kondisi stunting yang dialami, serta juga memberikan penyuluhan kepada generasi muda, para pelajar di tingkat SMA yang merupakan generasi masa depan daerah. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Balai Penyuluhan Keluarga Bencana (BPKB) tidak hanya melaksanakan program, tetapi juga sebagai fasilitator dalam menangani stunting. Beberapa kegiatan yang dilakukan Balai Penyuluhan Keluarga Bencana (BPKB) dalam mempercepat penurunan stunting di Kab. Kubu Raya adalah sebagai berikut : 1). Memfasilitasi koordinasi antar instansi, seperti: menyelenggarakan rapat koordinasi lintas sektor dengan kecamatan, KUA, Sekolah SMP, SMA/SMK dan lainnya, selain itu juga mendorong sinergi program bangga kencana dan program penurunan stunting, serta membantu penyusunan rencana aksi bersama tingkat kecamatan/desa. 2). Memfasilitasi Penyuluhan dan Edukasi dalam beberapa bentuk kegiatan seperti: memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan (HPK) serta memberikan pemahaman kepada keluarga mengenai pola makan seimbang, sanitasi serta perilaku hidup bersih dan sehat. 3). Memfasilitasi Keterlibatan Masyarakat, Balai Penyuluhan Keluarga Bencana (BPKB) berperan dalam memberdayakan masyarakat agar aktif dalam upaya pencegahan stunting dengan bentuk kegiatan seperti : mengajak tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat untuk menyuarakan pentingnya gizi dan kesehatan ibu dan anak 4) Memfasilitasi pelaksanaan program lapangan, Balai Penyuluhan Keluarga Bencana (BPKB) membantu melaksanakan berbagai kegiatan teknis dilapangan seperti: pendampingan keluarga berisiko stunting, mendukung kegiatan pos gizi desa serta posyandu.

Sebagai fasilitator, Balai Penyuluhan Keluarga Bencana (BPKB) Sungai Ambawang berperan penting dalam menghubungkan, memberdayakan, dan memperlancar koordinasi antar-pihak dalam upaya percepatan penurunan stunting. Dengan peran ini, Balai Penyuluhan Keluarga Bencana (BPKB) memastikan seluruh kegiatan berjalan sinergis, efektif, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga serta kualitas sumber daya manusia di wilayah Sungai Ambawang.

Peran Balai Penyuluhan Keluarga Berencana sebagai Katalisator dalam Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Studi Kasus di Kecamatan Sungai Ambawang, Kasus Kabupaten Kubu Raya

Stunting merupakan salah satu permasalahan gizi kronis yang menjadi prioritas nasional. Dasar payung hukum dalam percepatan penurunan stunting diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Kebijakan ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan unit pelaksanaannya di tingkat kecamatan, yaitu Balai Penyuluhan KB (BPKB). Memili peran sebagai katalisator program, yang merupakan salah satu pihak di tingkat kecamatan yang berperan mempercepat, mendorong, dan menggerakkan pelaksanaan suatu program agar mencapai hasil yang diharapkan lebih cepat dan efektif. Dalam pelaksanaannya sebagai katalisator, Balai Penyuluhan KB memiliki beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan yang berfungsi strategis dalam menyinergikan berbagai pihak untuk mempercepat pencapaian target penurunan stunting di Kecamatan Sungai Ambawang melalui berbagai kegiatan yang dilakukan seperti: 1) Pemberian pelayanan KB gratis, pelaksanaan genting, komunikasi informasi dan edukasi sasaran penurunan stunting. 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Program, Balai Penyuluhan KB berperan dalam mengintegrasikan program lintas sektor seperti kesehatan, pendidikan, sosial, dan ketahanan pangan.

Melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan, BPKB menjadi penghubung antara kebijakan kabupaten dan pelaksanaan di tingkat desa. 3). Penyuluhan dan Edukasi Keluarga, BPKB Sungai Ambawang aktif memberikan penyuluhan gizi, kesehatan reproduksi, dan pola asuh 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan). Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Balai Penyuluhan Keluarga Bencana (BPKB) dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Kecamatan Sungai Raya, diantaranya: kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan stunting serta wilayah Kec. Sungai Ambawang yang luas yang terdiri dari 15 (lima belas) desa.

Selain itu, terkadang pegawai Balai Penyuluhan Keluarga Bencana (BPKB) kesulitan untuk turun kelapangan dalam memberikan binaan karena bertepatan dengan harus pelatihan yang harus diikuti.

Peran Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) Sungai Ambawang sebagai Regulator dalam Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Studi di Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya

Penguatan peran regulator, terhadap beberapa aspek seperti: peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan rutin yang biasa dilakukan, baik secara tatap muka maupun melalui daring, memastikan ketercukupan anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan yang berasal dari pemerintah pusat. 2) Pengaturan standar teknis dan prosedur operasional, seperti : pemantauan tumbuh kembang anak, dan rujukan kasus stunting agar sesuai dengan kebijakan kabupaten/provinsi/nasional 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi program, seperti: mengatur mekanisme pelaporan data dan evaluasi capaian dari setiap kegiatan yang dilakukan di tingkat desa atau kelompok sasaran, dan menggunakan hasil evaluasi digunakan untuk meningkatkan efektivitas program dan memastikan terjadinya penurunan stunting di kecamatan sungai ambawang, kabupaten kubu raya.

Sebagai regulator, BPKB Sungai Ambawang berperan dalam mengatur arah kebijakan, menetapkan pedoman pelaksanaan, serta melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan program percepatan penurunan stunting. Dengan peran ini, BPKB memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai standar, terkoordinasi, dan memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka stunting di Kecamatan Sungai Ambawang. Selain itu, dukungan Bupati Kabupaten Kubu Raya sangat tinggi terkait program penurunan stunting ini yang berkaitan dengan dukunga dana dan fasilitas serta teknis kebijakan lainnya.

Peran Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) Sungai Ambawang sebagai Dinamisator dalam Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Studi Kasus di Kecamatan Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya

Balai Penyuluhan KB merupakan unit pelaksana teknis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di tingkat kecamatan. Sejak diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, BKKBN ditetapkan sebagai koordinator pelaksana percepatan penurunan stunting secara nasional.

Dengan demikian, Balai Penyuluhan KB memiliki peran penting di tingkat lokal sebagai penggerak (dinamisator) kebijakan ini. Di Tingkat daerah, aturan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan adalah Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 50 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dinamisator berarti pihak yang menggerakkan, membangkitkan semangat, dan menjaga keberlanjutan aktivitas agar tetap berjalan aktif, terarah, dan berkesinambungan. Dalam konteks program pembangunan, termasuk penurunan stunting, Balai Penyuluhan Keluarga Bencana (BPKB) sebagai dinamisator berperan untuk menjadi penggerak utama yang memastikan seluruh unsur pelaksana tetap aktif, termotivasi, dan bekerja bersama mencapai tujuan. Terkait peran dinamisator peran aktif Balai Penyuluhan Keluarga Bencana (BPKB) diantaranya yaitu : meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya stunting, mendorong komitmen pemerintah desa terhadap program kesehatan keluarga serta menurunkan prevalensi stunting secara bertahap di wilayah sungai ambawang. Untuk mencapai tujuan terkait penurunan jumlah stunting, peran Balai Penyuluhan Keluarga Bencana (BPKB) sebagai dinamisator dalam pelaksanaan kebijakan publik, beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu: Memastikan sinergi antara program kesehatan, gizi, sanitasi, dan ketahanan pangan keluarga, Melaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait gizi seimbang, pentingnya 1000 HPK, dan kesehatan reproduksi, Melakukan pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari bidan, kader PKK, dan penyuluh KB serta Memberikan rekomendasi kebijakan atau perbaikan teknis kepada pemerintah daerah apabila ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan.

PENUTUP

Kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Kubu Raya merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam mendukung program nasional Percepatan Penurunan Stunting. Melalui sinergi lintas sektor antara Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (BPKB), puskesmas, pemerintah desa, dan masyarakat, upaya ini diarahkan untuk memperbaiki kondisi gizi, kesehatan ibu dan anak, serta kesejahteraan keluarga. Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi juga melibatkan pendekatan pendidikan, sosial, ekonomi, dan lingkungan. BPKB Sungai Ambawang berperan penting sebagai fasilitator, katalisator, dinamisator, dan regulator dalam menggerakkan koordinasi, memberikan edukasi, memantau pelaksanaan, serta memastikan keberlanjutan program di tingkat kecamatan dan desa. Namun Demikian, Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor Pemerintah Kabupaten Kubu Raya perlu terus memperkuat koordinasi antarinstansi, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, BKKBN, serta pemerintah kecamatan dan desa.

Sinergi yang solid akan memastikan program penurunan stunting berjalan terpadu, tidak tumpang tindih, dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

1. Atmarita. (2012). Masalah Anak Pendek di Indonesia dan Implikasinya terhadap Kemajuan Negara. *Jurnal Gizi Indonesia*, Vol. 35 No. 2, 2012
2. Azwar. 1987 . *Metode Penelitian*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
3. Faisal, Sanapiah. 2010. Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif. Dalam Burhan Bungin (editor). *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
4. Miles, Mattew B dan A. Michael Huberman.1992. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. *Analisis Data Kualitatif: Buke Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI- PRESS).
5. Nawawi, Hadari. 1998. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Pers. Jakarta.
6. Sugiyono, (2005). *Teknik Pengumpulan Data*, Jakarta: PT. Haji Mas Agung.
7. Thaha R. (2012). *Gerakan Nasional Sadar Gizi Menuju Indonesia Prima*, 12 Januari 2012.
8. Trihono,dkk.2015. *Pendek (Stunting) di Indonesia, masalah dan solusinya*. Jakarta: Badan Penelitian dan Kesehatan Masyarakat.
9. Yusuf, A Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
10. Nuningsi, Sikla Idwi. 2024 . *Peran Penyuluh Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Dalam Meningkatkan Pemahaman Bahaya Narkoba Bagi Remaja di Kota Pontianak*. Laporan Akhir. Politeknik Negeri Pontianak.
11. Trihono,dkk.2015. *Pendek (Stunting) di Indonesia, masalah dan solusinya*. Jakarta: Badan Penelitian dan Kesehatan Masyarakat.
12. *Peraturan Bupati Kubu Raya No 50 tahun 2024 Tentang Percepatan Penurunan Stunting*.
13. *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting*.
14. *Peraturan Kepala Badan BKKBN No 12 Tahun 2017 Tentang Pendetayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga BKKBN*.
15. *Peraturan Kepala Badan BKKBN Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana*.